

Implementasi program Tangerang berbenah oleh dinas perumahan dan permukiman (Disperkim) dalam mewujudkan kota layak huni

Eka Kurnia Putra^{1✉}, Maulana Rifai², Kariena Febriantini³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa, Karawang.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Tangerang Berbenah oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dalam Mewujudkan Kota Layak Huni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer yang bersumber dari data informan secara langsung dan data sekunder dari data pendukung. Penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara yang mendalam terhadap narasumber serta diperkuat dengan dokumentasi dan didukung oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Tangerang Berbenah oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dalam Mewujudkan Kota Layak Huni terlaksana dengan baik, hal itu terlihat dari program bedah rumah yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dalam proses pengimplementasian program tersebut.

Kata kunci: Implementasi; program Tangerang berbenah; kota layak huni

Implementation of the improved Tangerang program by the housing and settlement agency (Disperkim) in realizing a livable city

Abstract

This research was conducted to find out, describe and describe how the Tangerang Cleanup Implementation Program by the Department of Housing and Settlements (Disperkim) in Creating a Livable City. The method used in this research is descriptive method with qualitative. Sources of data obtained are primary data sources sourced from informant data directly and secondary data from supporting data. This research was carried out by observation, in-depth interviews with the speakers supplemented with support and supported by secondary data. The results showed that the Tangerang Improvement Implementation Program by the Department of Housing and Settlements (Disperkim) in Realizing a Livable City was carried out well, it was seen from the house renovation program which every year, significant developments, and no changes in the program implementation process.

Key words: Implementation; Tangerang improving program; livable cities

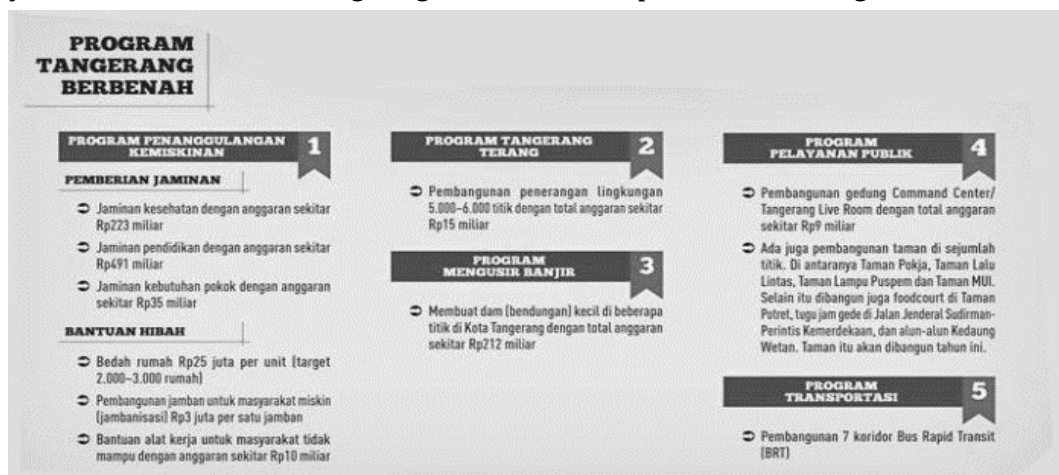
PENDAHULUAN

Indonesia sejatinya adalah negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Worldometers, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok (1,42 miliar jiwa), India (1,37 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta jiwa). Tingginya angka kepadatan penduduk akan menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat atau tidak layak, dan lain sebagainya.

Rumah adalah kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat. Rumah memiliki fungsi sebagai tempat untuk berlindung selain itu, rumah sebagai tempat tinggal harus aman dan nyaman ketika ditempati. Rumah yang layak ditempati adalah rumah yang telah memenuhi standar rumah sehat atau layak huni. Akan tetapi untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukan sebuah perkara yang mudah dan gampang. Kemampuan setiap masyarakat yang berbeda yang membuat terjadinya jurang pemisah. Hal inilah yang menjadi salah satu parameter dalam penentu kemiskinan yaitu kondisi rumah yang tidak layak huni.

Kota Tangerang adalah sebuah kota penyangga Jakarta, Kota Tangerang mengalami proses pembangunan yang sangat pesat hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kecipratan pembangunan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Kota Tangerang sejak 10 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dari segi infrastruktur, ekonomi, sosial-budaya serta birokrasinya. Berbicara mengenai dari segi birokrasi, Kota Tangerang telah membuat dan meluncurkan sebanyak 114 aplikasi yang mana semua itu terintegrasi dengan yang namanya Aplikasi LIVE. Aplikasi LIVE merupakan sebuah aplikasi yang dibuat pada 27 November 2015 yang bertujuan untuk memudahkan bagi masyarakat Kota Tangerang untuk mengakses layanan publik yang mana hal tersebut memudahkan masyarakatnya di jaman disrupsi seperti sekarang ini. LIVE sendiri dalam hal ini terdiri dari Liveable, Investable, Visitable, dan e-City. Kemajuan kota yang sangat pesat memicu dan munculnya permasalahan baru di Kota Tangerang salah satunya yaitu rumah yang tidak layak huni.

Rumah yang tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi standar rumah sehat atau layak huni. Untuk memecahkan masalah tersebut pemerintah Kota Tangerang telah meluncurkan sebuah program yang dinamakan Tangerang Berbenah. Tangerang berbenah merupakan sebuah program yang telah diluncurkan tahun 2015. Program tersebut terdapat di Aplikasi LIVE yang mana dalam L diaplikasi LIVE berarti Leveable (Layak Huni). Leveable memiliki berbagai macam program tidak hanya Tangerang Berbenah tetapi juga ada Tangerang Terang, Tangerang Bersih, Tangerang Berkebun, Tangerang Hijau dan Tangerang Sehat, Program Tangerang Berbenah sendiri merupakan sebuah program yang dikhususkan untuk menciptakan Kota Tangerang sebagai kota layak huni, dalam mewujudkan hal tersebut Kota Tangerang terus melakukan pembenahaan disegala sektor.



Gambar 1.
Program Tangerang Berbenah

Dalam program Tangerang Berbenah ada beberapa program prioritas dalam mewujudkan kota layak huni yaitu Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), Jalan Lingkungan, Drainase, Bedah Rumah dan Pembangunan Sarana Sanitasi atau MCK. Program Tangerang Berbenah ini filosofinya sederhana yaitu berbenah atau beres-beres. Pada dasarnya konsep program Tangerang Berbenah ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 yang bertujuan untuk mewujudkan Tangerang LIVE (liveable, investable, visitable, e-city). Seluruh program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat Kota Tangerang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud untuk menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terdapat dalam masalah penelitian ini secara kompleks. Adapun lokasi pada penelitian ini adalah di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada program bedah rumah. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan secara langsung kepada narasumbernya melalui observasi langsung, dan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur atau informasi lainnya terkait dengan penelitian yang dilaksanakan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan diatas, dapat dijelaskan dibawah ini;

Ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan hilang, maka akan terjadi konflik diantara para agen pelaksana implementasi. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, waktu dan finansial. Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini bagaimana kinerja dari intitusi formal dan informal dalam pengimplementasian kebijakan.

Sikap/kecenderungan pelaksana Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari:

Pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan; dan

Arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection).

Intensitas terhadap kebijakan

Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam implementasi perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik variabel ini mencakup struktur sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Program Tangerang Berbenah oleh Dinas Perumahan Permukiman (Disperkim) dalam Mewujudkan Kota Layak Huni. Penelitian ini menggunakan teori dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Program Bedah Rumah

Program bedah rumah merupakan program yang dilakukan Kota Tangerang untuk merenovasi rumah rumah yang tidak layak huni. Program yang dibentuk pada tahun 2015, merupakan salah satu cara yang disiapkan oleh pemerintah Kota Tangerang untuk mewujudkan kota layak huni. Program ini sangat didukung oleh walikota dengan mengeluarkan Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni telah membuat perubahan pada esketika Kota Tangerang. Adanya PERWALI yang dikeluarkan diharapkan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicitakan. Program yang berjalan dalam Kurung waktu dari 2015-2018 telah menyelesaikan sebanyak 5872 rumah. Hal tersebut dapat dilihat data dibawah ini:

Tabel 1.
Data Program Beda Rumah

BEDAH RUMAH	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
	1.107	1.451	2.314	1000

Berdasarkan tabel diatas bisa dikatakan bahwa pemerintah Kota Tangerang benar-benar serius dalam mewujudkan kota layak huni dengan memperhatikan dari aspek kemanusiaan. Dapat dilihat bahwa dari tahun-ketahun program bedah rumah mengalami peningkatan walupun ada tren menurun pada tahun 2018. Hasil yang sebanyak itu dengan program yang baru berjalan selama kurang lebih 5 tahun tersebut, dapatkan dikatakan terimplementasi dengan baik.

Untuk mendapatkan bantuan program rumah ini, masyarakat harus mengajukan kepada kelurahan masing-masing dari kelurahan langsung diajukan ke Dinas Perumahan dan Permukiman, dari dinas aka nada petugas lapangan yang mengecek apa warga yang mengajukan pantas untuk mendapatkan bantuan program tersebut. Adapun syarat masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan program bedah rumah yaitu:

Masyarakat tidak mampu;
Kondisi rumah tidak layak;
Rumah tidak sehat tanpa sanitasi; dan
Atap rapuh.

Sedangkan untuk cara mendaftar program beda rumah yaitu
Rekomendasi surat pengantar dari RT/RW setempat atau dengan kata lain memiliki surat keterangan miskin;
Melampirkan foto rumah, di rumah berdiri serta dilahan pribadi;
Setelah data masuk, pemerintah melakukan verifikasi status lahan dan cek lapangan; dan
Jika tidak ada masalah maka langsung di proses.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Program Tangerang Berbenah Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dalam Mewujudkan Kota Layak Huni

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni mengamanatkan program tersebut ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program tersebut. Kemudian dinas melakukan kerjasama dengan BKM yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis lapangan.

Menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan diatas, dapat dijelaskan dibawah ini;

Ukuran dan tujuan kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (agustino 2006). Dalam konteks penelitian mengenai implementasi program Tangerang berbenah oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dalam mewujudkan kota layak huni. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya program ini ialah agar masyarakat mendapatkan rumah yang layak pada umumnya, pemerintah harus hadir dalam hal ini karena kewajiban pemerintah yaitu untuk memberikan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya salah satunya yaitu tempat tinggal atau rumah. Sedangkan yang menjadi ukuran keberhasilan dari program tersebut ialah ketika masyarakat telah mendapatkan haknya dalam bentuk program tersebut. Program yang dibentuk pada tahun 2015 ini telah menyelesaikan program bedah rumah sampai akhir 2018 sebanyak 5872 unit rumah. Hal tersebut sangatlah mengembirakan publik dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan dan penikmat produk pelayanan. Diharapkan dengan adanya program bedah rumah tersebut akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi pengangguran sehingga perwujudan kota layak huni dapat dicapai dan diraih.

Sumber daya

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada sisi kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia merupakan sumber daya terpenting dan menjadi point pertama dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Van Meter dan Va Horn.

Mengenai sumber daya manusia dalam pengimplementasian program bedah rumah. Instansi Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) memiliki jumlah pegawai sebanyak 63 orang. Pada program bedah rumah jumlah pegawai/petugas lapangan berjumlah 8 orang, yang memiliki tugas untuk mengecek dan menverifikasi pada saat proses di lapangan. Hal tersebut dapat dikatakan sangat baik atau memumpuni dari sisi petugasnya, karena pada saat proses di lapangan tidak semua kecamatan akan mendapatkan program bedah rumah tersebut. Maka dari itu pada konteks sumber daya manusia tidak terdapat permasalahan yang berarti walaupun Kota Tangerang memiliki 13 kecamatan. Akan tetapi hanya kurang optimal pada proses pengawasan di lapangan.

Berbicara dalam hal sumber daya waktu dalam Pengimplementasian Program Tangerang Berbenah Oleh Dinas Perumahan Dan Permukiman (Disperkim) Dalam Mewujudkan Kota Layak Huni dalam hal program bedah rumah. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam program bedah rumah tergantung situasi dan kondisi di lapangan, biasanya waktu yang diperlukan satu sampai dua minggu dalam proses renovasi. Hal tersebut dipengaruhi dari partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Sumber daya finansial pada proses pelaksanaannya di lapangan. Pada program bedah rumah ini setiap warga yang mendapatkan bantuan program tersebut akan diberikan uang sebesar 20 juta untuk melakukan renovasi. Pelaksanaan pembangunan melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) masing-masing kecamatan. Bersama masyarakat serta petugas lapangan dari Disperkim sebagai pengawas terhadap jalannya program tersebut. Serta dana atau finansial dari program tersebut berasal dari APBD Kota Tangerang.

Karakteristik Agen Pelaksana

Pada saat pelaksanaan program, yang menjadi titik Pusat perhatian pada agen pelaksana yaitu pada organisasi formal dan organisasi informal karena kedua organisasi tersebut terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal tersebut sangat penting, karena sebuah kinerja pada implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Pada proses pengimplementasian program tersebut, yang menjadi agen pelaksana ialah Dinas Perumahan Dan Permukiman (Disperkim) Kota Tangerang sebagai instansi yang memiliki program tersebut menjalin kerjasama oleh Badan Keswadayaan Masyarakat.

Pada pelaksanaannya, peran agen sudah cukup baik dan memiliki komitmen yang besar dalam mewujudkan program tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena para agen pelaksana telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing masing dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari yang dikerjakan lembaga/instansi tersebut.

Sikap/Kecenderungan Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) mengatakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang telah dilaksanakan bukan hasil dari keinginan masyarakat yang memahami betul bentuk permasalahannya. Tetapi kebijakan publik yang biasanya bersifat *topdown* yang diambil oleh para pemangku kebijakan. Mungkin saja para pengambil kebijakan tidak mengetahui tentang apa yang dibutuhkan dan yang harus diselesaikan. Adapun Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Pada saat proses pelaksanaan program, adapun sikap atau kecenderungan para agen pelaksana pada program bedah rumah sudah dapat dikatakan cukup baik, dalam hal memberikan pelayanan yang maksimal kepada penikmat produk layanan yaitu masyarakat karena pihak pelaksana sudah paham terdapat permasalahan yang ada serta kebijakan yang diambil. Hal tersebut dapat dilihat pada Disperkim dan BKM yang telah komitmen dengan segala bentuk kondisi yang terjadi di lapangan pada saat menjalankan program tersebut. Adanya pola hubungan kedua institusi dalam pelaksanaan pembangunan, maka program tersebut akan berhasil pada saat implementasinya.

Komunikasi antar organisasi

Pada proses pengimplementasi, program dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana. Sebuah program perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain agar tercapainya tujuan program tersebut. Konteks komunikasi antar organisasi terkait dengan Implementasi Program Tangerang Berbenah Oleh Dinas Perumahan Dan Permukiman (Disperkim) Dalam Mewujudkan Kota Layak Huni dengan program beda rumah yang melibatkan Disperkim, dan BKM serta masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Dan Permukiman kepada BKM yaitu menunjuk BKM sebagai teknis pelaksana atau pelaksana program, karena keterlibatan BKM sebagai wujud sinergisitas pemerintah daerah dengan masyarakat dalam membangun Kota Tangerang. Adapun komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Dan Permukiman kepada masyarakat yaitu, menjelaskan tentang bagaimana persyaratan dalam mendapatkan program tersebut serta menjelaskan kepada masyarakat tentang salah satu mewujudkan Kota Tangerang layak huni dengan menerapkan pola hidup bersih dan dimulai dari rumah masing-masing.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan dalam hal ini faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat mempengaruhi proses Implementasi Program Tangerang Berbenah Oleh Dinas Perumahan Dan Permukiman (Disperkim) Dalam Mewujudkan Kota Layak Huni

Berbicara mengenai lingkungan ekonomi, dapat dikatakan bahwa Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang berkembang, hal itu karena effect sebagai penyangga ibukota. Kota Tangerang telah bertransformasi menjadi kota industri sekaligus jasa dan pariwisata yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap ekonomi penduduknya. Akan tetapi masih banyak masyarakat Kota Tangerang yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal tersebut tercermin dari banyaknya rumah yang tidak layak huni yang terdapat di Kota Laks. Untuk itu program bedah rumah hadir untuk memecahkan persoalan tersebut dengan hal itu Kota Tangerang bisa mewujudkan kota layak huni. Program ini lahir dari ketidakmampuan masyarakat Kota Tangerang dalam membuat rumah yang layak untuk di tempati.

Kondisi sosial yang ada saat sekarang ini telah mengubah segalanya. Kehadiran program setidaknya telah merubah sedikit wajah tatanan Kota Tangerang dalam mewujudkan kota layak huni, program bedah rumah telah merubah pola kebiasaan masyarakat yang sebelumnya terbiasa hidup di rumah yang tidak layak huni, sekarang mereka bisa hidup di rumah layak huni. Adapun representatif rumah yang dikatakan tidak layak huni yaitu pertama ditinjau dari aspek kesehatan yang berupa sanitasi, sirkulasi udara dan pencahayaan. Kedua kecukupan luas ruangan dan yang ketiga kondisi kerusakan.

Pengaruh politik dalam pengimplementasi program ini tidak ada sama sekali. Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR menjadikan Program Tangerang Berbenah menjadi Pilot Project untuk menata kawasan permukiman. Sedangkan pemerintah daerah dan DPRD mendukung sekali atas

program tersebut karena program tersebut merupakan bagian intisari dalam mewujudkan Kota Tangerang Layak Huni.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai Implementasi Program Tangerang Berbenah Oleh Dinas Perumahan Dan Permukiman (Disperkim) Dalam Mewujudkan Kota Layak Huni dengan menggunakan teori Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn yang memiliki enam indikator yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Seperti berikut:

Ukuran dan tujuan kebijakan

Kebijakan ini salah satu bentuk tindakan yang dilakukan Kota Tangerang dalam mewujudkan kota layak huni. Adanya program ini diharapkan taraf kualitas kehidupan masyarakat semakin tinggi, karena hal tersebut berdampak kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program bedah rumah yang dibentuk pada tahun 2015 telah memberikan kontribusi nyata terhadap kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam bentuk rumah yang layak huni.

Sumber daya

Mengenai sumber daya yang mana terbagi ke dalam 3 pokok pembahasan yaitu manusia, waktu dan finansial. Pada ketiga sumber daya penerapannya sudah optimal, hanya ada masalah pada sumber manusia, karena kurangnya pengawasan pada saat proses dilapangan. Untuk masalah sumber daya waktu hanya proses pelaksanaannya tergantung dari animo serta partisipasi masyarakat sedangkan untuk sumber daya finansial, sudah dikatakan aman, karena dana sudah terakomodir didalam APBD.

Karakteristik Agen Pelaksana

Adapun yang dapat ditarik kesimpulan dari karakteristik agen pelaksana ialah tupoksi ataupun tugas yang diemban oleh kedua lembaga tersebut telah dijalankan dengan sebaik mungkin sesuai dengan tupoksi Dari Dinas Perumahan dan Permukiman dan Badan Keswadayaan Masyarakat.

Sikap/Kecenderungan Pelaksana

Kesimpulan dalam hal indikator ini ialah bentuk pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi hasil akhir, dalam hal ini pihak instansi dalam naungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang telah memberikan pelayanan yang maksimal begitupun dengan BKM, kolaborasi antar dua agen pelaksana akan memberikan sentuhan yang luar biasa terhadap jalannya program tersebut.

Komunikasi antar organisasi

Komunikasi sesuatu hal yang utama untuk mengaet sebuah program, keberhasilan suatu program tentu salah satu faktornya yaitu komunikasi. Maka dari itu diharapkan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dan Badan Keswadayaan Masyarakat terus terjalin secara harmoni, agar implementasi program terlaksana dengan baik maka hal itu akan mudah untuk mewujudkan Kota Tangerang layak huni.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Ketiga unsur ini saling mempengaruhi. Pada lingkungan ekonomi representatif Kota Tangerang sebagai kota yang kena cimpratan pembangunan ibukota, masih banyak rumah yang tidak layak untuk dihuni, hal tersebut menjadi sebuah pukulan telak bagi pemerintah daerah Kota Tangerang untuk terus memberikan pelayanan dalam kebutuhan dasar bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membangun rumah yang layak huni. Pada bagian sosial, dengan dibangunnya rumah yang layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi maka setidaknya akan merubah pola hidup dan pada bagian politik tidak memiliki pengaruh apa apa karena program ini sangat di dukung seluruh komponen serta elemen yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Zuliyanti (2017) "Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat". <http://repository.radenintan.ac.id>.
- Fikra Sutan Purnama (2017)" Partisipasi Masyarakat Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Terhadap Program Pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh". <http://repository.uinjkt.ac>.
- Leo Agustino, 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, CV
- Subarsono, A.G.2005, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi. Pustaka Belajar: Yogyakarta
- Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni
- Sugiono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- <https://www.megapolitanpos.com/detail/13922/kementerian-pupr-menjadikan-program-tangerang-berbenah-menjadi-pilot-project> (diakses pada tanggal 9 November 2019 pada pukul 4.30 wib)
- <https://www.penamerdeka.com/433223/dinas-perkim-kota-tangerang-realisisasi-kota-layak-huni.html> (diakses pada tanggal 9 November 2019 pada pukul 6.30 wib)
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia> (diakses pada tanggal 9 November 2019 pada pukul 10.30 wib).